



Pengambilalihan Terminal Giwangan Perlu Diperjelas

YOGYA (KR) - Komisi C DPRD Kota Yogyakarta berencana melakukan advokasi ke Kementerian Perhubungan RI terkait pengambilalihan pengelolaan Terminal Giwangan Yogyakarta, sebagai terminal Tipe A oleh Pemerintah Pusat setelah masa reses pada akhir bulan ini. Hasil tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti perkembangan proses pengambilalihan yang masih belum tuntas hingga saat ini.

"Kami ingin tahu pelimpahannya sudah sampai sejauh mana. Karena ketika kami audiensi dengan Kementerian Perhubungan RI, pengambilalihan pengelolaan juga harus disertai penyelesaian semua masalah yang sebelumnya menjadi tanggungan Pemkot Yogyakarta termasuk ganti rugi pada PT Perwita Karya senilai Rp 56 miliar," tutur Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Suwanto kepada wartawan sela rapat kerja Komisi C dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Senin (9/1).

Dalam kesempatan tersebut Komisi C DPRD Kota Yogyakarta juga mempertanyakan luasan wilayah yang pengelolaannya ditangani pusat.

Termasuk soal nasib PNS maupun karyawan non-PNS di Terminal Giwangan Yogyakarta setelah proses pengambilalihan ini.

Dijelaskan Suwanto, pihaknya tidak melulu pada nilai finansial yang diperoleh dengan pengelolaan terminal penumpang tersebut. Tapi lebih fokus pada pemberian kenyamanan dan keamanan masyarakat, khususnya pengguna moda transportasi di Terminal Giwangan.

"Jangan sampai sekali-kali merugikan masyarakat dan pengguna jasa Terminal Giwangan," tegasnya.

Sebab itu pihaknya berharap untuk tidak saling menghindar terkait dengan pengelolaan ini. Harus ada komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga keluhan-keluhan yang dihadapi bisa segera terselesaikan.

"Jangan sampai nanti banyak lahan kosong di terminal karena tidak terurus. Ini pemerintah, bukan pihak swasta," katanya.

Terpisah Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudo menekankan kepastian pengambilalihan Terminal Giwangan oleh pemerintah pusat. Namun begitu kejelasan detail pengambilalihan harus lebih rinci. Sehingga saat ini operasional dianggarkan oleh pemerintah pusat.

"Karena itu perlu tindak lanjut legalitas dari pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah (PP) sehingga operasional pengelolaan bisa tetap berjalan normal," katanya.

Hario Yudo mengaku, untuk operasional pertahun Terminal Giwangan selama ini membutuhkan pembiayaan sekitar Rp 3 miliar. Sementara pendapatan yang diterima melalui retribusi yang diatur di Perda Jasa Umum juga di kisaran angka tersebut. (R-7)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat
Bas. Tapem	<input type="checkbox"/> Netatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005